



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SUB UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**
3. NHK : **509741**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	656.941.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/36 m2 di SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 31.106.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/144 m2 di SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 127.512.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 620 m2/300 m2 di SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 459.200.000		
4. Tanah Seluas 1.449 m2 di SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 39.123.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	113.500.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA V LUXURY Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, HONDA ASTREA C 100 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.630.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	209.002.696
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	993.073.696



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 993.073.696

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.